



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENDRA SUMARYANA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 742506

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.715.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/170 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000
2. Tanah Seluas 340 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
3. Tanah Seluas 936 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
4. Tanah Seluas 1270 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000
5. Tanah Seluas 3808 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000
6. Tanah Seluas 2471 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
7. Tanah Seluas 3500 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 14.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT AT / NC 11 B1 C Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. 143.723.245

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 2.813.228



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.875.536.473
III. HUTANG	Rp.	477.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.398.536.473

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.